

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
20 - 26 Juli 2020

LULUK'S UPDATE

MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI

**Intensitas Emisi
Diproyeksikan Turun**

Intensitas emisi diproyeksikan turun 22 persen dengan pelaksanaan LCDI

- Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan intensitas emisi gas rumah kaca Indonesia dapat turun 22 persen jika menjalankan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (Low Carbon Development Indonesia/LCDI).

Irfan Darliazi
Staf Direktorat
Lingkungan Hidup
Kementerian PPN
Bappenas

- perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia dikembangkan berdasarkan kajian berbasis bukti dan diintegrasikan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Berdasarkan kajian di bawah Bappenas, perencanaan pembangunan rendah karbon tersebut dibuat dapat mengakomodasi ekonomi dan sosial, namun tetap mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Irfan Darliazi
Staf Direktorat
Lingkungan Hidup
Kementerian PPN
Bappenas

- Dalam LCDI, proyeksi pertumbuhan ekonomi cukup baik rata-rata enam persen, begitu pula untuk Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat dengan baik. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan 4,2 persen sebagai dampak positif perbaikan lingkungan.
- Dengan LCDI, harapannya target penurunan emisi GRK Indonesia di 2030 untuk memenuhi Paris Agreement terpenuhi dan di saat yang sama intensitas emisi turun 22 persen.
- Tantangan pembangunan berkelanjutan saat ini banyak, salah satunya pandemi COVID-19, sehingga perlu kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dalam LCDI.

Irfan Darliazi
Staf Direktorat
Lingkungan Hidup
Kementerian PPN
Bappenas

- Dari pandemi COVID-19 bisa dilihat tidak hanya dampak kesehatan dan sosial saja, tetapi juga dampak pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02 persen ke 2,8 persen. PDB turun ke 2,97 persen, sedangkan angka pengangguran diperkirakan 2,92 juta orang.
- Penanganan pandemi COVID-19 jangan sampai mempengaruhi ekonomi. Ada kekhawatiran karena ingin menggenjot ekonomi pascakrisis kesehatan, maka isu lingkungan juga menjadi parah.
- Dalam 2 tahun ke depan pemulihan ekonomi akan dilakukan, pembangunan dikerjakan dengan menjalankan build back better, sehingga dampak lingkungan dapat ditekan, pembangunan ekonomi menjadi lebih tangguh, terjadi penciptaan lapangan kerja, aspek kesehatan jadi lebih tangguh, kebutuhan sehari-hari pangan berkelanjutan, dan mampu melakukan mitigasi bencana di masa depan.

Hotspot di Sumsel Mulai Bermunculan

174 Hotspot Muncul di Sumsel

- Menjelang datangnya musim kemarau, titik panas atau hotspot di Sumatera Selatan mulai bermunculan. Selama Juli 2020, berdasar pantauan LAPAN, sedikitnya ada 174 hotspot tersebar di wilayah itu. Kondisi mesti diwaspadai karena puncak musim kemarau sudah dekat, yakni Agustus dan September 2020.
 - titik panas itu tersebar di 14 kabupaten dan kota dari total keseluruhan 17 kabupaten dan kota. Terbanyak berada di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah 51 titik, Muara Enim 25 titik, Penukal Abab Lematang Ilir 24 titik, Ogan Ilir 22 titik, dan Musi Rawas 12 titik.
 - Daerah-daerah itu masuk dalam sepuluh wilayah rawan karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya

Ansori

BPBD Sumsel

Upaya Restorasi Gambut

KLHK Kenalkan Paludikultur untuk Restorasi Gambut

- KLHK mengenalkan konsep paludikultur untuk melakukan restorasi gambut.
- Paludikultur merupakan sebuah konsep budidaya tanaman di lahan gambut tergenang dan mempunyai implikasi positif pada keberlanjutan lahan gambut salah satunya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena membasahi lahan gambut.

Alue Dohong
Wakil Menteri
LHK

- peran strategis paludikultur di lahan gambut menjadi sebuah pilihan menjanjikan untuk perbaikan dan restorasi gambut.
- Gambut yang tidak terbakar juga akan mengurangi pelepasan gas rumah kaca sehingga menjadi salah satu pendorong upaya mitigasi perubahan iklim.

Alue Dohong
Wakil Menteri
LHK

- Dengan paludikultur dapat mencegah karhutla karena paludikultur menggunakan kondisi lahan yang tetap basah dan lembab maka lahan gambut yang basah ini akan mencegah gambut mudah terbakar akibat kekeringan pada musim kemarau
- untuk menyelamatkan ekosistem gambut maka bisa dilakukan dengan mendorong penanaman tanaman endemik kawasan gambut baik tanaman keras/pepohonan maupun tanaman semusim/budidaya.
- Tanaman yang dibudidayakan dalam konsep paludikultur harus mampu mendorong terbentuknya gambut baru melalui akumulasi sisa biomassa dari budidaya dengan konsep Paludikultur yang akhirnya akan memperbaiki ekosistem gambut terdegradasi.

Alue Dohong
Wakil Menteri
LHK

- Saat ini, tercatat sekitar 534 jenis spesies tanaman endemik lahan gambut, seperti sagu, ramin, jelutung, belangiran, gelam, dan lain sebagainya, serta 81 jenis dari spesies tersebut merupakan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti purunm kangkung, pakis pakisan yang merupakan jenis yang dapat dikembangkan dalam Paludikultur.

Pembukaan Lahan Gambut

Pembukaan Lahan Gambut

- PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Arara Abadi (Arara), perusahaan pemasok maupun anak usaha Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group ini diduga membuka gambut sekitar 3.500 hektar dan bikin kanal 53 kilometer sejak Agustus 2018-Juni 2020.
- APP memiliki kebijakan konservasi hutan sejak 2013. Aksi ini, langkah mundur dari komitmen mereka melindungi dan merestorasi ekosistem.
- Jikalau melaporkan PT Arara Abadi ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Jikalau mendesak Polda Riau segera menetapkan Arara Abadi sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan.

Kiki Taufik
Global Head Forest
Campaign
Greenpeace
Indonesia

- Dari pecitraan satelit, Greenpeace menemukan, luasan area gambut dibuka dari masing-masing perusahaan, yaitu 2.110 hektar di PT Bumi Mekar Hijau, 1.200 hektar PT Bumi Andalas Permai dan 170 hektar PT Arara Abadi. Hanya PT Bumi Andalas Permai yang dalam analisis itu tidak ditemukan pembukaan kanal. Pada PT Bumi Mekar Hijau buka kanal sampai 48.000 meter, PT Arara Abadi sepanjang 5.000 meter.
- Pemasok dan anak usaha Asia Pulp & Paper (APP), yaitu PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Arara Abadi (Arara) diduga membuka gambut sekitar 3.500 hektar dan bikin kanal 53 kilometer sejak Agustus 2018-Juni 2020. Pada akhir Juni saja, terjadi kebakaran sekitar 50 hektar di Arara Abadi.

Kiki Taufik
Global Head Forest
Campaign
Greenpeace
Indonesia

- Pemilik konsesi secara legal bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah mereka
- APP memiliki kebijakan konservasi hutan sejak 2013. Aksi ini langkah mundur dari komitmen mereka melindungi dan merestorasi ekosistem. APP juga membuat upaya mereka pakai pendekatan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lain tidak lebih sekadar guyonan.
- Beberapa perusahaan besar seperti Unilever, Nestlé, Asku dan Woolworths merupakan pembeli atau yang menerima hasil perkebunan dan hasil dari hutan tanaman industri APP
- Temuan Greenpeace ini menggunakan analisis citra satelit terbaru, sejak Agustus 2018-Juni 2020., kecuali Arara analisis data sejak Januari 2020.

**Kiki Taufik
Global Head Forest
Campaign
Greenpeace
Indonesia**

- Metodologi dalam menganalisis adalah penggunaan citra satelit dari Sentinel-2 oleh European Space Agency (ESA). Dari sini, Greenpeace memetakan interpretasi vegetasi. Cara ini juga membuat mereka dapat estimasi lokasi dan area pembukaan lahan dalam periode waktu yang spesifik. Selanjutnya, overlay data dengan data spasial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian.
- Dari langkah pencitraan itulah diketahui luasan area gambut yang dibuka dari masing-masing perusahaan, yaitu 2.110 hektar di BMH, 1.200 hektar BAP dan 170 hektar Arara. Hanya BAP yang dalam analisis itu tidak ditemukan pembukaan kanal. Pada BMH buka kanal sampai 48.000 meter, Arara sepanjang 5.000 meter.

Kiki Taufik
Global Head Forest
Campaign
Greenpeace
Indonesia

- Konsesi BMH di Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan Greenpeace, BMH merupakan perusahaan terbesar ketiga yang memiliki lahan terbakar pada 2015-2018. Diperkirakan sekitar 63.000 hektar lahan perusahaan ini terbakar hanya pada 2015. Sejak 2015-2019, ada 87.603 hektar lahan terbakar di konsesi ini dengan empat kejadian.
- Pemerintah Indonesia pernah menggugat perusahaan ini atas kebakaran 20.000 hektar pada 2014.
- Untuk BAP, ada tiga kali kebakaran memakan 84.401 hektar area sejak 2015-2019. Bahkan, perusahaan ini memiliki area terbakar terluas di antara konsesi lain pada 2015-2018.

**Kiki Taufik
Global Head Forest
Campaign
Greenpeace
Indonesia**

- Sanksi administratif terhadap perusahaan yang memiliki konsesi di Sumatera Selatan ini hanyalah perintah untuk penanaman kembali lahan terbakar 2015.
- Dari ketiga perusahaan ini, hanya Arara di luar Sumsel, tepatnya di Pelalawan, Riau. Sejak 2015-2019, Greenpeace mencatat ada lima kali kebakaran dengan luas lahan 12.269 hektar.

Jikalahari melaporkan Arara Abadi

- Tidak hanya Greenpeace, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) juga menemukan pelanggaran sama pada Arara. Perusahaan ini dikatakan sengaja membakar hutan sampai 83 hektar.
- Dugaan area terbakar sejak 28 Juni itu didapat berdasarkan hitungan Citra Sentinel 2. Jikalahari juga mendapatkan koordinat dari foto saat Tim Manggala Agni memadamkan api di lahan gambut yang di-overlay dengan peta izin usaha pemanfaatan hasil hutan jayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) hingga ditemukan lokasi kebakaran di konsesi Arara di Desa Merbau, Pelalawan.
- Tim Jikalahari mendatangi lokasi kebakaran pada 3 Juli 2020 dan masih melihat ada asap mengepul karena sebagian lahan masih terbakar.
- Jikalahari menemukan, lokasi terbakar sudah selesai staking dan siap tanam akasia. Bahkan, di beberapa blok ditemukan akasia baru tanam dan tidak terbakar.

- Ada informasi kalau asal api kebakaran dari kebun masyarakat di luar konsesi Arara. Ketika ditelusuri, jarak antara kebun masyarakat terbakar dengan Arara sekitar 680 meter dan tak ada api penghubung.
- Hasil analisis hotspot melalui satelit Terra Aqua-Viirs, hotspot dan kebakaran di luar konsesi lebih dulu terjadi, yaitu, 24 Maret-2 April. Di dalam konsesi Arara hotspot dan kebakaran terekam 28 Juni.
- Saat overlay titik koordinat lokasi kebakaran dengan peta indikatif restorasi gambut BRG, areal kebakaran Arara berada di zona merah, merupakan prioritas restorasi pasca kebakaran 2015-2017 tetapi restorasi tidak jalan dan malah kembali terbakar.
- Temuan lain, berdasarkan citra satelit Sentinel 2, areal yang terbakar adalah hutan alam ditumbuhi semak belukar pada Januari, pada Februari mulai ada pembukaan lahan areal yang terbakar, pada Maret hingga Mei ditemukan adanya pembukaan kanal baru dan menambah pembukaan lahan. Terakhir, pada Juni terjadi penambahan pembukaan lahan hingga terbakar pada 28 Juni.

- Berdasarkan kalkulasi Jikalahari, kebakaran ini merusak gambut dan lingkungan hidup termasuk melebihi baku mutu ambien udara ini merugikan lingkungan hidup Rp20,6 miliar.
- Jikalahi pun melaporkan Arara ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
- Jikalahari mendesak, Polda Riau segera menetapkan Arara sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan. Jikalahari juga merekomendasikan KLHK mencabut konsesi Arara terbakar untuk jadi fungsi lindung gambut.

Pihak APP meragukan Analisis Greenpeace

- APP melalui keterangan resminya meragukan analisis Greenpeace. Menurut mereka, analisis itu dengan pemetaan yang tak jelas. APP sudah pemetaan LiDAR yang komprehensif bersama para ahli Deltares terhadap konsesi para pemasok, termasuk wilayah penanaman dan konservasi dalam konsesi.
- Pemetaan terakhir APP pada 2018 menghasilkan peta gambut dengan tingkat akurasi tinggi. Peta itu telah dibagikan kepada KLHK sebagai basis penetapan kawasan kubah gambut yang perlu dilindungi di bawah PP Gambut baru.
- Soal kebakaran, APP menyatakan tak mengimbau praktik pembukaan lahan dengan pembakaran kepada penyuplai mereka. Meskipun demikian, bukan berarti tak akan ada api di dalam konsesi. Ada tantangan di lapangan karena kompleksitas penggunaan lahan di konsesi, termasuk pada desa-desa di dalam dan sekitar konsesi.
- APP mengapresiasi masukan-masukan Greenpeace.

Sikap KLHK atas temuan Greenpeace dan Jikalahari

- KLHK masih belum bisa bersikap terkait temuan Greenpeace dan Jikalahari ini. Mereka menyatakan, masih memerlukan waktu untuk membaca dan mengkaji terlebih dahulu hasil temuan itu.

Bambang Hendroyono
Sekjen KLHK
merangkap PLt Dirjen
PHPL

- Kami harus lihat dulu kejadian seperti apa. Karena kalau gambut itu kan harus dilihat dari segala aspek, termasuk pemulihan ekosistem gambutnya. Jadi, menurut saya, saat ini kami perlu mempelajari lebih lanjut dulu tentang kejadian itu

Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural (LNS)

Presiden resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembubaran badan dan komite ini termuat dalam Pasal 19 dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 yang ditetapkan Presiden pada 20 Juli 2020.

18 tim kerja, badan, dan komite tersebut adalah:

- 1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
- 2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

- 3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- 4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
- 5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

- 6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Air Minum
- 7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019
- 8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- 9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

- 10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri
- 11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization

- 12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 133/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN
- 13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan presiden No 53/2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
- 14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 80/2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

- 15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 24/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
- 16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No 28/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

- 17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
- 18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 37/2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

18 Lembaga yang dibubarkan Presiden berbeda dengan usulan KemenPAN-RB

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan 18 lembaga yang dibubarkan Presiden berbeda dengan usulan KemenPAN-RB.
- KemenPAN-RB tengah mengkaji lembaga nonstruktural yang sudah tidak efektif dan efisien untuk dibubarkan.
- 18 lembaga yang telah dibubarkan itu di luar kewenangan KemenPAN-RB karena tidak termasuk yang diusulkan atau kajian KemenPANRB untuk dibubarkan.
- Berdasarkan penelusuran KemenPAN-RB, 18 lembaga itu terdiri atas 13 yang tidak termasuk lembaga nonstruktural (LNS), empat lembaga nonstruktural, dan satu lembaga merupakan lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014.

- KemenPAN-RB tengah mencermati lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal. Lembaga atau komisi yang dinilai tidak maksimal akan diusulkan untuk dihapus atau dibubarkan.
- Selama ini ada 24 lembaga atau kondisi yang sudah dihapus, dan tersisa 96 lembaga atau komisi yang pembentukannya melalui keputusan Undang-undang maupun keputusan Pemerintah. Namun, tidak berarti semua lembaga itu akan dihapus. Lembaga yang urgensinya dinilai belum maksimal yang akan dihapus dari 96 lembaga tersebut.
- Sehingga, jika ada lembaga atau komisi yang urgensinya dinilai perlu, maka tidak akan dihapus. KemenPAN-RB tengah mengoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait lembaga mana yang urgensinya dinilai belum maksimal.

Rencana Pembubaran BRG

Rencana Pembubaran BRG

- Presiden sebelumnya mengatakan ada 18 lembaga yang dipertimbangkan untuk dibubarkan.
- Pada 14 Juli 2020 Kepala KSP menyebutkan 3 lembaga yang kemungkinan akan dibubarkan, salah satunya Badan Restorasi Gambut.
- KemenPANRB mengkaji bahwa nantinya dari sisi kebakaran akan ditangani oleh BNPB, sementara dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian akan berada di Kementerian Pertanian
- Namun dalam Perpres 82 terkait dengan pembubaran 18 Lembaga Negara Non Struktural, BRG tidak termasuk lembaga yang dibubarkan.

- Kepala BRG mengaku belum ada informasi dari Istana kepada lembaganya terkait kelanjutan BRG. Namun dalam rapat terbatas 23 Juni 2020, Presiden memerintahkan BRG untuk membasahi dan memantau kebasahan gambut.
- BRG fokus menyelesaikan target kerja 2020. Area gambut non-konsesi yang sudah direstorasi seluas 778.181 hektare di 7 provinsi atau 89 persen dari target seluas 890.241 hektare.
- Untuk target restorasi di area konsesi perkebunan, BRG mendukung KLHK serta Kementerian Pertanian dengan melakukan supervisi teknis hingga sudah mencapai 80 persen dari target.
- Dan terus memfasilitas para kader gambut yang sudah berjumlah 12.000 lebih di tingkat tapak untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga ekosistem gambut

- Sejak dibentuk pada 2016 hingga Juni 2020, BRG menggunakan anggaran sebesar Rp 1,04 triliun. Sebagian besar anggaran digunakan untuk program di tingkat tapak. Adapun untuk gaji pegawai dan operasional kantor hanya sekitar 10 persen.
- Dalam anggaran tahunan, biasanya 50 persen anggaran disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk aksi restorasi gambut bersama unsur masyarakat di desa. Sehingga BRG hanya mengelola 50 persen dan sebagian besarnya untuk program di tingkat tapak.
- Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Keuangan, tahun 2018 BRG mendapat anggaran Rp515,28 miliar dari APBN. Kemudian setahun kemudian turun cukup signifikan menjadi Rp310,24 miliar. Sementara tahun ini anggarannya naik sedikit menjadi Rp312,99 miliar.

- BRG mendapat dukungan dari beragam kelompok masyarakat.
- Berikut dukungan dan pendapat terkait Rencana Pembubaran BRG

Daniel Johan
Wakil Ketua
Komisi
Lingkungan DPR

- pemerintah perlu mengkaji seksama rencana membubarkan BRG karena BRG memiliki kontribusi nyata terhadap upaya penyelamatan gambut serta edukasi masyarakat sehingga layak dipertahankan.
- BRG menjalankan peran edukasi, mendistribusikan pengetahuan dan praktik terbaik pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, terutama di kawasan yang masyarakatnya bertani di lahan gambutapat upaya ini baik untuk mengurangi dampak bencana kabut asap.
- Peran setingkat badan yang berdiri sendiri sangat diperlukan, karena masalah gambut ini adalah masalah spesifik, menjadi perhatian dunia internasional

Heri Mustari
Ketua DPW
Gerbang Tani
Kalimantan Barat

- berharap Jokowi tak membubarkan badan adhoc yang dibentuk sejak 2016 ini.
- Keberadaan BRG masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kawasan hidrologis gambut tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kawasan itu

Wahyu Perdana
Manajer Kampanye
Pangan, Air, dan
Ekosistem Esensial
WALHI

- tak terlalu mempersoalkan keberlanjutan kelembagaan adhoc BRG, karena evaluasi kelembagaan hal jamak dalam pemerintahan
- kerja-kerja penyelamatan ekosistem gambut juga tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan. Saat ini masih minim evaluasi terkait restorasi ekosistem gambut di lahan konsesi. Sebaliknya, pemerintah malah mencetak sawah di lahan gambut di Kalteng

Suraya Afiff
Antropologi UI
dan
peneliti Gambut

- Diperlukan sebuah lembaga negara dengan kewenangan yang kuat untuk mengatasi permasalahan struktural kebakaran hutan dan lahan gambut di daerah.
- Hampir semua karhutla di Indonesia terjadi karena persoalan struktural. Jika penanggulannya hanya di memadamkan api, sampai kapan pun tak akan tuntas kalau masalah struktural tidak diatasi. Masalah struktural hanya bisa diatasi oleh lembaga yang bisa sama-sama melibatkan semua pihak
- Konsensi perusahaan seperti perkebunan sawit rawan konflik. Masyarakat sekitar tidak mendapat keuntungan dengan konsesi besar di daerahnya. Perusahaan kerap mengabaikan tuntutan masyarakat sehingga melahirkan konflik berkepanjangan.
- Dalam riset yang dilakukan, selama ini karhutla lebih banyak terjadi di kawasan konsesi.

**H Abdul Wahid HK
Bupati Hulu Sungai
Utara**

- Keberadaan BRG penting dan bermanfaat sehingga harus diperkuat.
- Pemerintah Pusat agar tetap memberikan lembaga pendamping desa guna memperkuat keberadaan BRG.
- BRG berkerja sama dengan daerah yang menjadi sasaran kegiatan restorasi itu, di antaranya daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang hampir 89 persen daerah perairan dan mempunyai lahan gambut yang cukup luas, yaitu sekitar 25.672 hektar dan seluas 6.273 hektar merupakan prioritas restorasi.

**H Abdul Wahid HK
Bupati Hulu Sungai
Utara**

- ada 16 Desa Peduli Gambut di Kabupaten HSU yang merupakan objek pendampingan oleh BRG. kegiatan pendampingan BRG ini sangat bermanfaat bagi desa-desa karena memberikan dampak yang sangat positif dibidang SDM dan peningkatan perekonomian kerakyatan serta pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat, di samping peningkatan wawasan terhadap perekonomian produktif di desa
- dalam menunjang program BRG, pemerintah telah menerbitkan Perbub serta berharap agar BRG tetap menjadi pendamping bagi desa.
- Sejak tahun 2019 sudah diterbitkan Perbub untuk desa peduli gambut dan desa di sekitarnya agar selalu bersinergi untuk membangun perekonomian

Sumber Berita

- <https://republika.co.id/berita/qdsylc328/pembubaran-lembaga-negara-terus-berlanjut>
- <https://investor.id/business/klhk-kenalkan-paludikultur-untuk-restorasi-gambut>
- <https://nasional.tempo.co/read/1369173/masih-dibutuhkan-badan-khusus-untuk-atasi-kerusakan-gambut/full&view=ok>
- <https://klikkassel.com/abdul-wahid-berpesan-keberadaan-restorasi-gambut-harus-diperkuat/>
- <https://riauone.com/global/Greenpeace--Para-Pemasok--Asia-Pulp--amp--Paper-Masih-Buka-Gambut-dan-Bikin-Kanal>
- <https://www.mongabay.co.id/2020/07/22/para-pemasok-app-masih-buka-gambut-dan-bikin-kanal/>
- https://sumsel.antaraneews.com/nasional/berita/1627358/intensitas-emisi-diprojektikan-turun-22-persen-dengan-pelaksanaan-lcdi?utm_source=antaraneews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaraneews
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/174-hotspot-muncul-di-sumsel-terbanyak-berada-di-musi-banyuasin.html>
- <https://nasional.tempo.co/read/1366839/jokowi-diminta-tak-bubarkan-badan-restorasi-gambut/full&view=ok>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/18480811/menurut-moeldoko-tiga-lembaga-ini-termasuk-yang-akan-dibubarkan?page=all>
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/15/337/2246948/pembubaran-lembaga-negara-tjahjo-tegaskan-tidak-ada-pemecatan-asn>
- <https://tirto.id/rencana-pembubaran-18-lembaga-ala-jokowi-jangan-hanya-gimik-fRFf>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4311269/menteri-tjahjo-kembali-usulkan-pembubaran-18-lembaga-ke-jokowi>
- <https://star.grid.id/read/452254549/sudah-ketok-palu-presiden-joko-widodo-akhirnya-resmi-membubarkan-18-lembaga-ini-daftar-dan-rinciannya>
- <https://ternate.tribunnews.com/2020/07/21/presiden-jokowi-resmi-bubarkan-18-lembaga-negara-yang-disebut-moeldoko-termasuk>

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

